

BAB II

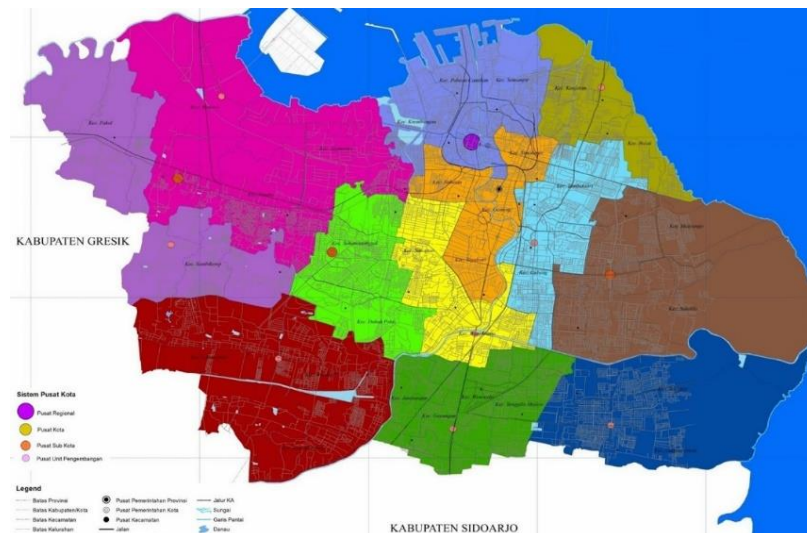
PROGRAM PADAT KARYA DI KOTA SURABAYA

2.1 Profil Kota Surabaya

2.1.1 Letak Geografis Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di bagian utara provinsi tersebut dan berada pada kawasan pesisir. Secara astronomis, Kota Surabaya terletak pada kisaran $7^{\circ}09' - 7^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}36' - 112^{\circ}54'$ Bujur Timur (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023). Posisi geografis ini menjadikan Surabaya sebagai kota strategis karena berada pada jalur perdagangan dan transportasi utama di wilayah Indonesia bagian timur.

Gambar 2. 1 Peta Kota Surabaya



Sumber: DPRKPP Kota Surabaya

Letak Kota Surabaya yang berhadapan langsung dengan Selat Madura memberikan pengaruh signifikan terhadap karakter fisik dan aktivitas ekonomi kota. Sebagai kota pesisir, Surabaya berkembang sebagai pusat perdagangan, pelabuhan, dan jasa, yang menopang kegiatan ekonomi regional maupun nasional. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak memperkuat peran Kota Surabaya sebagai simpul distribusi barang dan mobilitas penduduk di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya. (Pemerintah Kota Surabaya, 2022); (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019)

Dari perspektif regional, Kota Surabaya merupakan pusat utama dalam kawasan metropolitan Gerbangkertosusila yang meliputi Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. Sebagai kota inti, Surabaya berperan sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*) yang mendorong perkembangan ekonomi dan spasial wilayah sekitarnya. Peran tersebut tercermin dari tingginya mobilitas penduduk antarwilayah, berkembangnya kawasan peri-urban di daerah penyangga, serta semakin terintegrasinya jaringan transportasi dan aktivitas ekonomi di kawasan metropolitan Gerbangkertosusila. (Putra, 2022)

2.1.2 Luas Wilayah dan Kondisi Fisik

Secara administratif, Kota Surabaya memiliki luas wilayah sekitar 326,36 km² yang terbagi ke dalam 31 kecamatan dan 154 kelurahan (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2023). Luas wilayah tersebut menjadikan Surabaya sebagai salah satu kota besar dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi di Indonesia. Kepadatan ini

berimplikasi pada kebutuhan pengelolaan ruang kota yang efektif, khususnya dalam penyediaan permukiman, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Berdasarkan kondisi topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya berupa dataran rendah dengan ketinggian rata-rata berkisar antara 3–6 meter di atas permukaan laut (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2024). Karakteristik dataran rendah ini menyebabkan Surabaya memiliki tingkat kerentanan terhadap permasalahan hidrologi, seperti genangan dan banjir, terutama pada wilayah-wilayah yang berada di dekat aliran sungai dan kawasan pesisir (Pemerintah Kota Surabaya., 2021). Beberapa bagian wilayah barat dan selatan kota memiliki kontur yang relatif lebih tinggi, meskipun tidak signifikan membentuk perbukitan besar. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2024)

Kondisi fisik wilayah Surabaya juga dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Kalimas yang merupakan bagian dari sistem Sungai Brantas serta jaringan sungai lainnya yang melintasi kawasan perkotaan. Sungai-sungai tersebut memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Kota Surabaya, terutama sebagai jalur transportasi dan perdagangan yang menghubungkan pelabuhan dengan wilayah pedalaman. Selain mendukung aktivitas ekonomi, jaringan sungai juga berfungsi sebagai bagian dari sistem drainase perkotaan. Seiring dengan pesatnya pembangunan kota dan perubahan tata guna lahan, pengelolaan sungai secara terpadu menjadi penting untuk menjaga fungsi lingkungan dan mengurangi berbagai permasalahan perkotaan yang muncul akibat degradasi kualitas Sungai. (Adi, 2019)

2.1.3 Batas Wilayah Administratif

Secara administratif, Kota Surabaya memiliki batas wilayah yang jelas dengan daerah-daerah di sekitarnya. Di sebelah utara dan timur, Kota Surabaya berbatasan langsung dengan Selat Madura. Batas laut ini memberikan karakter maritim yang kuat serta membuka peluang pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan logistik. Di sebelah selatan, Kota Surabaya berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2023)

Secara geografis, Surabaya berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo di bagian selatan dan Kabupaten Gresik di bagian barat. Keterdekatan wilayah tersebut telah membentuk hubungan fungsional yang kuat dalam kawasan metropolitan Gerbangkertosusila. Interaksi antar daerah terlihat melalui tingginya mobilitas tenaga kerja, aktivitas perdagangan, serta perkembangan kawasan industri yang saling terhubung. Kondisi ini menempatkan Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan regional yang berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan urbanisasi di wilayah sekitarnya. (Putra, 2022); (Pemerintah Republik Indonesia, 2022)

2.1.4 Demografi Penduduk Kota Surabaya

Penduduk merupakan salah satu aspek utama dalam perencanaan pembangunan daerah karena karakteristik demografis suatu wilayah akan memengaruhi kebutuhan layanan publik, penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, serta kebijakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, analisis struktur penduduk berdasarkan jenis

kelamin dan kelompok umur diperlukan untuk memahami kondisi demografis serta potensi pembangunan yang dimiliki suatu daerah. Data jumlah penduduk Kota Surabaya tahun 2024 memberikan gambaran mengenai komposisi penduduk yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2024); (Kementerian PPN/Bappenas., 2022)

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Surabaya Menurut
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Jiwa)

Kelompok Umur.	Jumlah Penduduk Surabaya Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Jiwa)		
	Laki-laki (2024)	Perempuan (2024)	Jumlah (2024)
0-4	98.070	92.253	190.323
5-9	118.098	111.574	229.672
10-14	126.914	119.428	246.342
15-19	124.481	117.094	241.575
20-24	123.369	118.344	241.713
25-29	113.131	111.452	224.583
30-34	108.743	109.497	218.240
35-39	106.949	107.515	214.464
40-44	122.094	124.972	247.066
45-49	110.402	114.726	225.128
50-54	99.971	104.626	204.597
55-59	81.459	89.578	171.037
60-64	60.278	71.348	131.626
65-69	45.728	54.858	100.586
70-74	29.417	35.556	64.973
75+	25.630	40.467	66.097
Jumlah	1.494.734	1.523.288	3.018.022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.018.022 jiwa, yang terdiri atas 1.494.734 jiwa penduduk laki-laki dan 1.523.288 jiwa penduduk perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa jumlah

penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, suatu pola yang relatif konsisten pada wilayah perkotaan besar. Perbedaan ini semakin terlihat pada kelompok umur lanjut, di mana angka harapan hidup perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2024)

Ditinjau dari struktur umur, penduduk Surabaya didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun). Kelompok usia 20–24 tahun hingga 49–54 tahun memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, masing-masing kelompok mencatat angka di atas 200 ribu jiwa. Kelompok umur dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat pada usia 40–44 tahun, yaitu sebanyak 247.066 jiwa, yang mencerminkan besarnya populasi penduduk yang berada pada puncak usia kerja dan produktivitas. Kondisi ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang sangat besar serta peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Kota Surabaya. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2024)

Selain itu, kelompok usia muda juga menunjukkan jumlah yang cukup besar. Kelompok usia 0–4 tahun hingga 14–19 tahun memiliki komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah yang masih tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa regenerasi penduduk di Kota Surabaya masih berlangsung dengan baik dan menjadi dasar penting bagi perencanaan sektor pendidikan, kesehatan anak, serta fasilitas pendukung pertumbuhan generasi muda. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2024)

Sementara itu, pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), jumlah penduduk menunjukkan kecenderungan menurun seiring bertambahnya usia. Namun demikian, pada hampir seluruh kelompok usia lanjut, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Fenomena ini mencerminkan perbedaan tingkat kelangsungan hidup antara kedua jenis kelamin serta menuntut perhatian khusus dalam penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas ramah lansia. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2024)

Secara keseluruhan, data jumlah penduduk Kota Surabaya tahun 2024 menunjukkan struktur penduduk yang relatif seimbang berdasarkan jenis kelamin dan didominasi oleh penduduk usia produktif. Kondisi ini menjadi modal demografis yang penting bagi pembangunan kota, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Apabila dikelola dengan baik, struktur penduduk tersebut dapat menjadi kekuatan utama dalam mendukung peran Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi dan aktivitas perkotaan di Jawa Timur. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2024)

Tabel 2. 2 Data Pengangguran Kota Surabaya Tahun 2024-2025

No.	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)
1.	2024	4,91%	1,62 juta	70,49%
2.	2025	4,84%	1,64 juta	70,59%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Tabel 2. 3 Data kemiskinan di Kota Surabaya pada Tahun 2024-2025

No.	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Garis Kemiskinan
1.	2024	3,96%	116,62 ribu	Rp742.678 per kapita per bulan
2.	2025	3,56%	105,09 ribu	Rp775.597 per kapita per bulan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Surabaya dari 4,91% pada tahun 2024 menjadi 4,84% pada tahun 2025, yang diikuti dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 3,96% menjadi 3,56% pada periode yang sama, menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu kebijakan yang mendukung upaya tersebut adalah Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya., 2024); (Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83, 2023)

2.2 Regulasi Program Rumah Padat Karya di Kota Surabaya

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya merupakan kebijakan strategis Pemerintah Kota Surabaya yang dirancang untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi masyarakat pascapandemi, khususnya terkait meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan menurunnya daya beli masyarakat. Dalam konsiderans peraturan tersebut dijelaskan bahwa program padat karya dikembangkan sebagai instrumen pemulihan ekonomi daerah yang melibatkan keluarga miskin secara langsung dalam proses pembangunan Kota Surabaya. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi sebagai bentuk

pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi aktif melalui kegiatan produktif yang memanfaatkan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, serta teknologi sederhana yang dapat dijalankan oleh masyarakat secara mandiri. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa padat karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada keluarga miskin yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Secara substantif, Perwali ini menekankan bahwa program padat karya memiliki orientasi pembangunan sosial dan ekonomi yang terintegrasi. Tujuan program sebagaimana diatur dalam Pasal 3 meliputi upaya memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan dasar, menciptakan lapangan kerja melalui mekanisme swakelola, serta membangkitkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, program ini diarahkan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin sekaligus meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan. Sasaran program tidak hanya berfokus pada pemberian pekerjaan sementara, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja lokal agar masyarakat mampu berdaya secara ekonomi. Dengan demikian, konsep padat karya dalam Perwali ini memiliki pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan (*empowerment-based development*), di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan pemerintah.

Dalam implementasinya, Perwali ini membagi program padat karya ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah dan pemberdayaan maupun pengelolaan usaha mikro. Pada klasifikasi pengadaan barang/jasa, program dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan pemerintah yang dibiayai melalui APBD, sedangkan pada pemberdayaan usaha mikro, pemerintah berperan sebagai fasilitator bagi keluarga miskin untuk membangun dan mengelola usaha produktif secara berkelompok. Mekanisme pemberdayaan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, verifikasi, pembentukan kelompok usaha, operasional usaha, kemitraan, pembinaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Menariknya, peraturan ini juga mengatur pembentukan kelompok usaha yang dilengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta program. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya berupaya menciptakan pekerjaan, tetapi juga mendorong formalitas dan keberlanjutan usaha masyarakat miskin agar mampu berkembang menjadi usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing.

Peraturan ini juga memperlihatkan adanya dukungan pemerintah yang cukup komprehensif terhadap keberlangsungan usaha masyarakat penerima manfaat. Pemerintah daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi dalam bentuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan pendampingan usaha. Selain itu, pemerintah memfasilitasi akses permodalan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemasaran produk usaha

mikro, hingga pemanfaatan hasil produksi oleh perangkat daerah maupun pihak lain. Program ini bahkan membuka peluang kemitraan antara kelompok usaha dengan koperasi melalui sistem bagi hasil yang diatur secara administratif dan legal oleh pemerintah daerah. Dengan pendekatan tersebut, program padat karya tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomi lokal melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga ekonomi daerah.

Di sisi lain, Perwali ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaan program padat karya. Pemerintah daerah mewajibkan pembaruan data dan pelaporan berkala melalui aplikasi Program Padat Karya yang memuat data produksi, jumlah tenaga kerja, pendapatan, hingga dokumentasi kegiatan. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menilai efektivitas program, dampak terhadap pengentasan kemiskinan, serta keberlanjutan usaha keluarga miskin peserta program.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya kemudian menetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Perwali Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan program dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program padat karya. Perwali Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan penting, mulai dari perluasan sasaran penerima manfaat, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, hingga penambahan

fleksibilitas dalam pelaksanaan kemitraan usaha. Adapun perbedaan substansi antara Perwali Tahun 2023 dan Perwali Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Perbandingan Perwali Nomor 83 Tahun 2023 dengan Perwali Nomor 6 Tahun 2025 Kota Surabaya

Aspek	Perwali No. 83 Tahun 2023	Perwali No. 6 Tahun 2025	Perubahan
Dasar Pembentukan	Berfokus pada pemulihan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.	Menambahkan dasar hukum Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta optimalisasi efektivitas Program Padat Karya.	Perwali 2025 memperkuat legitimasi program dengan menyesuaikan arah kebijakan daerah terkait percepatan penanggulangan kemiskinan.
Sasaran Penerima Program	Hanya ditujukan kepada Keluarga Miskin.	Diperluas menjadi Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera.	Perubahan ini menunjukkan perluasan cakupan program agar kelompok rentan yang belum masuk kategori miskin tetap memperoleh akses pemberdayaan ekonomi.
Definisi Padat Karya	Padat karya merupakan pemberdayaan masyarakat kepada keluarga miskin.	Definisi diubah menjadi pemberdayaan kepada keluarga miskin dan keluarga pra sejahtera.	Program menjadi lebih inklusif dan preventif terhadap potensi kemiskinan baru.
Definisi Keluarga Pra Sejahtera	Belum diatur.	Ditambahkan definisi keluarga pra sejahtera sebagai keluarga dengan pengeluaran 1–1,6 kali garis kemiskinan.	Perwali 2025 memperjelas segmentasi sosial ekonomi penerima manfaat program.
Keanggotaan Kelompok Usaha	Kelompok usaha hanya dibentuk oleh keluarga miskin.	Kelompok usaha dapat beranggotakan keluarga miskin dan/atau pra sejahtera.	Memberikan fleksibilitas kelembagaan dan memperluas partisipasi masyarakat.
Tujuan Program	Fokus pada peningkatan akses keluarga miskin dan peningkatan pendapatan keluarga miskin.	Ditambah cakupan keluarga pra sejahtera dalam peningkatan akses pelayanan dasar dan pendapatan.	Tujuan program bergeser menjadi lebih luas dan preventif terhadap kerentanan sosial ekonomi.
Sasaran Program	Pendayagunaan tenaga kerja lokal terutama keluarga miskin.	Pendayagunaan tenaga kerja lokal yang berasal dari keluarga miskin dan/atau pra sejahtera.	Menunjukkan perluasan orientasi program terhadap kelompok rentan ekonomi.

Penerima Manfaat	Penerima manfaat hanya keluarga miskin dan masyarakat umum.	Ditambah keluarga pra sejahtera sebagai penerima manfaat resmi.	Program menjadi lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat perkotaan.
Persyaratan Peserta	Peserta harus masuk data keluarga miskin.	Peserta dapat berasal dari data keluarga miskin maupun pra sejahtera.	Memperluas akses masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi.
Pembentukan Kelompok Usaha	Hanya mengatur pembentukan kelompok usaha.	Ditambahkan pengukuhan kelompok usaha oleh Camat melalui berita acara resmi.	Menunjukkan penguatan aspek administratif dan legalitas kelompok usaha.
Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan	Pendaftaran BPJS bersifat wajib dalam operasional usaha.	Ketentuan diubah menjadi lebih fleksibel, hanya menekankan perlindungan dan keselamatan kerja.	Perubahan ini kemungkinan bertujuan mempermudah implementasi program bagi peserta usaha kecil.
Kemitraan Usaha	Kemitraan hanya dengan koperasi.	Ditambahkan Pasal 26A yang memungkinkan kemitraan dengan pihak lain yang memiliki keahlian tertentu.	Perwali 2025 membuka peluang kolaborasi lebih luas untuk mendukung profesionalitas usaha.
Persetujuan Kemitraan	Persetujuan hanya oleh Perangkat Daerah Koordinator.	Persetujuan dapat diberikan oleh Camat atau Kepala Perangkat Daerah Koordinator.	Menunjukkan desentralisasi kewenangan agar proses lebih cepat dan efisien.
Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dilakukan oleh perangkat daerah dan kecamatan dengan laporan berkala.	Dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi khusus yang memiliki pembagian tugas lebih rinci.	Sistem pengawasan diperkuat agar pelaksanaan program lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
Keberlanjutan Peserta Program	Evaluasi berdasarkan rata-rata pendapatan bersih 12 bulan terakhir keluarga miskin.	Evaluasi juga berlaku bagi keluarga pra sejahtera.	Menunjukkan adanya pendekatan keberlanjutan program berbasis peningkatan kesejahteraan peserta.

Sumber: Diolah penulis dari perwali yang digunakan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk penyempurnaan dan evaluasi lanjutan terhadap implementasi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya. Jika Perwali Tahun 2023

lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan ekonomi daerah, pengurangan pengangguran, serta pemberdayaan keluarga miskin melalui penciptaan lapangan kerja berbasis masyarakat, maka Perwali Tahun 2025 hadir untuk memperluas cakupan, memperkuat efektivitas pelaksanaan, serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat Kota Surabaya. Perubahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas lahirnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga program padat karya tidak lagi hanya menyoar keluarga miskin, tetapi juga mencakup kelompok masyarakat pra sejahtera yang rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. (Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83, 2023)

Selain memperluas sasaran penerima manfaat, Perwali Tahun 2025 juga memperlihatkan adanya penguatan tata kelola program melalui penambahan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis, pembentukan tim monitoring khusus, legalisasi kelompok usaha melalui pengukuhan oleh camat, serta pembukaan peluang kemitraan dengan pihak lain yang memiliki keahlian tertentu. Dengan demikian, Perwali Tahun 2025 dapat dipahami sebagai bentuk transformasi kebijakan dari program yang semula berorientasi pada penanganan dampak ekonomi jangka pendek menuju model pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Perubahan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan Program Padat Karya tidak hanya sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan

dan penguatan kapasitas kelompok rentan secara berkesinambungan. (Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83, 2023)

2.3 Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/300/436.1.2/2024 Tentang Tim Program Padat Karya Pemerintah Kota Surabaya

Dokumen Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/300/436.1.2/2024 tentang Tim Program Padat Karya Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk konkret kebijakan publik di tingkat daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta penguatan ekonomi lokal berbasis partisipasi tenaga kerja. Jika ditelaah secara komprehensif, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum administratif, tetapi juga merepresentasikan arah kebijakan pembangunan inklusif yang berupaya menjawab persoalan struktural seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan akses ekonomi di perkotaan. Pada bagian konsiderans, pemerintah daerah menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023, sekaligus hasil evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam proses perumusan kebijakan yang bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. ((Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/300/436.1.2/2024))

Dari aspek legalitas, keputusan ini memiliki legitimasi yang kuat karena didasarkan pada berbagai regulasi yang berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah hingga peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, pengadaan barang dan jasa, serta pemberdayaan UMKM. Kerangka hukum yang komprehensif ini mengindikasikan bahwa Program Padat Karya tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, program ini dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan strategis yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. ((Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/300/436.1.2/2024))

Pada bagian diktum keputusan, pemerintah menetapkan pembentukan Tim Program Padat Karya dengan struktur organisasi yang cukup kompleks dan melibatkan berbagai unsur perangkat daerah. Struktur ini terdiri atas pengarah yang dijabat oleh Wali Kota, penanggung jawab oleh Sekretaris Daerah, serta beberapa ketua dan koordinator bidang yang memiliki fungsi spesifik. Pembagian tugas dalam tim ini mencerminkan prinsip *division of labor* dalam administrasi publik, di mana setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Misalnya, ketua tim bertugas melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan serta memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara koordinator bidang perencanaan bertanggung jawab mengintegrasikan program dengan dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan RKA-PD. ((Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/300/436.1.2/2024))

Selain itu, terdapat pula koordinator bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang berfungsi memfasilitasi proses pengadaan sesuai regulasi, serta koordinator bidang pemberdayaan usaha mikro yang berfokus pada pendampingan, pembinaan, dan pengelolaan usaha masyarakat. Keberadaan bidang kerjasama menunjukkan pentingnya jejaring kemitraan dalam memperluas akses pasar dan permodalan, sedangkan bidang aplikasi dan promosi berperan dalam pengelolaan data serta strategi pemasaran produk usaha. Tidak kalah penting, bidang monitoring dan evaluasi memiliki tugas untuk melakukan penilaian secara sistematis terhadap kinerja program, termasuk dampak dan keberlanjutan kegiatan. Pembagian fungsi ini secara tidak langsung mencerminkan penerapan prinsip *good governance*, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan program publik. ((Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/300/436.1.2/2024))

Selanjutnya, dokumen ini juga dilengkapi dengan lampiran yang memuat susunan keanggotaan tim serta pembagian perangkat daerah pengampu berbagai jenis usaha padat karya. Pada lampiran pertama (halaman 6), terlihat bahwa keanggotaan tim melibatkan berbagai pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, mulai dari kepala badan, kepala dinas, hingga kepala bagian. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam pelaksanaan program. Sementara itu, pada lampiran kedua (halaman 7 hingga 9), dijelaskan secara rinci pembagian bidang usaha yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah, seperti usaha kuliner, jasa cuci kendaraan, produksi batik, hingga usaha berbasis jasa seperti pijat kebugaran dan

perawatan AC. Pembagian ini tidak hanya mencerminkan diversifikasi jenis usaha, tetapi juga menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi lokal serta menciptakan peluang kerja yang variatif bagi masyarakat. ((Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/300/436.1.2/2024))

Secara analitis, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menciptakan *local economic resilience* melalui pendekatan padat karya. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan pekerjaan sementara, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha masyarakat melalui pendampingan dan penguatan kapasitas. Dengan adanya integrasi data, monitoring yang sistematis, serta dukungan lintas sektor, program ini berpotensi menjadi model kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan struktural di perkotaan. Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial. ((Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/300/436.1.2/2024))

2.4 Profil Program Rumah Padat Karya di Kota Surabaya

Tabel 2. 5 Gambaran Umum Daerah, Permasalahan Daerah, dan Inovasi Solusi

No.	Aspek	Uraian/Rincian	Jumlah/Keterangan
1.	Gambaran Umum Daerah	Populasi	3.008.760 jiwa
		Pramiskin	279.500 jiwa
		Keluarga Miskin	105.090 jiwa
		Data Aset Total	4.993 lokasi
		Total Luas Aset	41.947.716 m ²
2.	Permasalahan Prioritas Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi Kemiskinan 2. Mengurangi Pengangguran 3. Mengurangi AKI dan AKB 4. Mengurangi Stunting 5. Meningkatkan Pembangunan Manusia 6. Menurunkan Kesenjangan 7. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 	Fokus Utama Pemangunan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah.
3.	Inovasi Sebagai Solusi Permasalahan Daerah	1. Kolaborasi/Kerja sama	Sinergi berbagai pihak untuk pengentasan kemiskinan
		2. Pemanfaatan Aset Padat Karya	Pemanfaatan aset daerah untuk pengentasan kemiskinan
		3. Pemutakhiran DTSEN	Pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional untuk ketepatan sasaran program

Sumber: Bappeda Kota Surabaya diolah oleh penulis

Tabel tersebut menggambarkan kondisi umum sekaligus permasalahan strategis yang dihadapi oleh Kota Surabaya, yang kemudian menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan berbasis padat karya. Secara demografis, daerah ini memiliki jumlah penduduk sebesar 3.008.760 jiwa, dengan kelompok prasejahtera (pramiskin) mencapai 279.500 jiwa dan jumlah keluarga miskin sebanyak 105.090 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi isu sentral yang memerlukan intervensi kebijakan yang terarah dan berkelanjutan. Di sisi lain, daerah ini juga memiliki potensi aset yang cukup besar, yaitu sebanyak 4.993 lokasi dengan total luas mencapai 41.947.716 meter persegi, yang apabila dikelola secara optimal

dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Permasalahan pembangunan daerah yang diidentifikasi dalam gambar ini tidak hanya terbatas pada kemiskinan, tetapi juga mencakup tingginya angka pengangguran, masih adanya tantangan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta persoalan stunting. Selain itu, terdapat pula kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif. Dengan demikian, pendekatan pembangunan yang digunakan tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus komprehensif dan terintegrasi antar sektor. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut, gambar ini menekankan pentingnya inovasi kebijakan dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan. Salah satu strategi yang ditawarkan adalah melalui program rumah padat karya yang memanfaatkan aset daerah sebagai sumber kegiatan produktif bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. Implementasi kebijakan ini didukung oleh tiga pilar utama, yaitu kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah berbasis rumah padat karya, serta pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTSEN) guna memastikan ketepatan sasaran program. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kota Surabaya Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Tahun					Keterangan (2025)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	82,31	82,74	83,99	84,69	85,65	Meningkat
2.	Nilai Investasi (Rp Triliun)	29,22	34,90	37,57	40,48	-	Data 2025 belum tersedia
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,29	6,51	5,70	5,76	-	Data 2025 belum tersedia
4.	Angka kemiskinan (%)	5,23	4,72	4,62	3,96	3,56	Menurun
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,68	7,62	6,76	4,91	4,84	Menurun
6.	Indeks Gini	0,351	0,388	0,423	0,831	0,369	Menurun (makin merata)

Sumber: Bappeda Kota Surabaya

Tabel tersebut menampilkan capaian indikator makro pembangunan Kota Surabaya yang merepresentasikan hasil dari berbagai intervensi kebijakan, termasuk pendekatan berbasis padat karya yang telah diuraikan pada gambar sebelumnya. Secara umum, data menunjukkan tren positif pada sejumlah indikator kunci pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) misalnya, mengalami peningkatan yang konsisten dari 82,31 pada tahun 2021 menjadi 85,65 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam dimensi kualitas hidup masyarakat, yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan daerah telah berjalan relatif efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Di sisi ekonomi, nilai investasi menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 29,22 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 40,48 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Surabaya, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi juga mengalami fluktuasi namun tetap berada dalam tren positif, dengan capaian sebesar 5,76 persen pada tahun 2024 setelah sempat mencapai puncaknya pada 6,51 persen di tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah mampu bertahan dan pulih, meskipun dihadapkan pada dinamika eksternal. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Selanjutnya, indikator sosial-ekonomi lainnya juga menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 5,23 persen pada tahun 2021 menjadi 3,56 persen pada tahun 2025, yang menegaskan keberhasilan program pengentasan kemiskinan, termasuk melalui skema padat karya yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 9,68 persen pada tahun 2021 menjadi 4,84 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Selain itu, Indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan juga cenderung menurun, dari 0,423 pada tahun 2023 menjadi 0,369 pada tahun 2025, yang mengindikasikan berkurangnya kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Tabel 2. 7 Kolaborasi Semua Unsur (Hepta Helix)

No.	Unsur	Peran/Kontribusi
1.	Unsur Pemerintah	ASN pendamping membantu fasilitasi program dari kota hingga RT/RW.
2.	Unsur Swasta/Dunia Usaha	Kerjasama menyerap tenaga kerja setempat dan CSR/CSV untuk sekitar.
3.	Akademisi/Perguruan Tinggi	Kerjasama dengan berbagai universitas dan perguruan tinggi.
4.	Unsur Komunitas	Pihak NGO, karangtaruna, BAZNAS, komunitas dan LSM.
5.	User/Pengguna	Sebagai <i>co-creator</i> dalam memberikan <i>feedback</i> , pengalaman pengguna (<i>user experience</i>) dan <i>demand</i> .
6.	Unsur Masyarakat	RT/RW, Kader Surabaya Hebat, LPMK, Bunda PAUD.
7.	Unsur Media	Keterlibatan media massa/ <i>online</i> dalam mendukung publikasi dan promosi.

Sumber: Bappeda Kota Surabaya

Tabel tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program pembangunan daerah, khususnya yang berbasis padat karya, tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan melalui model hepta helix. Konsep ini merepresentasikan sinergi antara tujuh aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta/dunia usaha, akademisi/ perguruan tinggi, komunitas, masyarakat, media, serta pengguna (*user*) sebagai penerima manfaat sekaligus *co-creator* dalam proses pembangunan. Pendekatan ini menjadi penting dalam konteks tata kelola pemerintahan modern yang menekankan pada prinsip *collaborative governance*, di mana proses perumusan hingga implementasi kebijakan dilakukan secara partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Dalam konteks ini, unsur pemerintah berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan keberlangsungan program melalui dukungan kebijakan dan pendampingan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga tingkat paling bawah, seperti RT/RW. Sementara itu, sektor swasta atau dunia usaha berkontribusi melalui penciptaan lapangan kerja serta pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/CSV) untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Di sisi lain, akademisi dan perguruan tinggi berfungsi sebagai mitra strategis dalam penyediaan kajian ilmiah, inovasi, serta pendampingan berbasis pengetahuan guna meningkatkan efektivitas program. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Selanjutnya, unsur komunitas dan masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting, terutama dalam aspek pelaksanaan dan keberlanjutan program di tingkat lokal. Keterlibatan berbagai elemen seperti RT/RW, kader masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), hingga organisasi sosial seperti Karang Taruna dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), menjadi kunci dalam memastikan bahwa program padat karya benar-benar menjangkau kelompok sasaran secara tepat. Peran media juga turut mendukung melalui publikasi dan diseminasi informasi, sehingga program yang dijalankan dapat diketahui secara luas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Yang tidak kalah penting, gambar ini juga menekankan posisi pengguna atau masyarakat sebagai *user* yang tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai *co-creator* yang memberikan umpan balik, pengalaman, serta kebutuhan

yang harus diakomodasi dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, pendekatan hepta helix ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari *government-centered* menuju *people-centered development*, di mana pembangunan tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan berbasis pada kolaborasi multipihak yang saling melengkapi. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Tabel 2. 8 Skema Business Matching x Padat Karya

Tahap	Pemerintah Kota Surabaya (<i>Demand</i>)	Padat Karya	Fasilitasi & Pendampingan	<i>Supply</i> (Penyedia)	Peken Surabaya	Pelaku UMKM
1	- Pengadaan Barang (Snack, Mamin, Baki, Seripah, ATK). - Potensi Padat Karya (Perbaikan Komponen BPAP).	CSR Perusahaan, BAZNAS	Pendataan dan Verifikasi (Survey Usaha, Minat).	Amenities Hotel Slipper Hasil Perikanan Hasil Pertanian	E-Katalog LKPP	Kuliner SWK, Oleh-Oleh Khas Surabaya, Produk UMKM
2	Pengadaan Jasa (Service AC, Pemasangan Paving, Peracikan.	-	Pelatihan, Sertifikasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan Kurasi Produk	Paving, Bak Sampah, Jasa Cuci AC.	Voucher Cuci Kendaraan (R2K Manyar Pelataran) Voucher Mamin (Viaduct by Gubeng).	-
3	-	-	Fasilitasi Sarana dan Prasarana	Hotel, Restoran, Masyarakat	-	-
4	-	-	Tes Minat Bakat	-	-	-
5	Pemerintah Kota Surabaya (Supply)	-	-	-	Peken Surabaya (Platform marketplace produk UMKM)	-
6	-	-	-	-	-	Berbagai Produk UMKM tersedia di Peken Surabaya.

Sumber: Bappeda Kota Surabaya

Tabel tersebut menjelaskan secara lebih operasional mengenai mekanisme implementasi program padat karya melalui pendekatan *business matching*, yang bertujuan untuk menghubungkan antara sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam ekosistem ekonomi lokal. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Surabaya berperan sebagai aktor utama pada sisi permintaan, khususnya melalui pengadaan barang dan jasa yang meliputi kebutuhan seperti konsumsi (snack dan minuman), alat tulis kantor (ATK), jasa teknis seperti perawatan AC, pemasangan paving, hingga percetakan. Selain itu, potensi padat karya juga diidentifikasi berdasarkan komponen belanja daerah (BP/AP), yang kemudian diarahkan untuk menyerap tenaga kerja lokal, terutama dari kelompok masyarakat miskin dan rentan. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Proses awal dalam skema ini dimulai dari pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat, khususnya keluarga miskin, melalui survei yang mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi serta minat dan bakat individu. Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas masyarakat. Selanjutnya, peserta program diberikan pelatihan, sertifikasi, serta bimbingan teknis yang mencakup aspek produksi, peningkatan kualitas produk, hingga kurasi usaha. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memenuhi standar pasar. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Dalam kerangka business matching, pelaku UMKM yang telah melalui proses pembinaan kemudian dihubungkan dengan berbagai kanal pasar. Di satu sisi, terdapat pasar institusional seperti pemerintah melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta program “Peken Surabaya” yang menjadi platform pemasaran produk lokal. Di sisi lain, sektor swasta seperti hotel dan restoran juga dilibatkan sebagai mitra yang menyerap produk dan jasa masyarakat, mulai dari kebutuhan amenities hotel (misalnya sandal/ *slipper*), hasil perikanan dan pertanian, hingga jasa seperti kebersihan dan perawatan. Selain itu, terdapat pula inovasi berupa sistem voucher untuk mendorong konsumsi layanan lokal, seperti voucher cuci kendaraan dan makanan-minuman, yang sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Lebih lanjut, dukungan pendanaan dan fasilitasi juga diperoleh dari berbagai sumber, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan lembaga seperti Baznas, yang berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dengan demikian, skema ini tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja sementara, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan melalui integrasi antara pelatihan, produksi, distribusi, dan konsumsi. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Tabel 2. 9 Intervensi Program dan Kegiatan

Mengurangi beban pengeluaran	Meningkatkan pendapatan	Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan
Sekolah dan seragam gratis jenjang SD dan SMP	Pemberdayaan UMKM melalui E-peken	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
Pemberian Beasiswa Pemuda Tangguh (siswa SMA/SMK dan mahasiswa), menghafal kitab suci, dan Beasiswa S1 untuk bunda PAUD	Pelatihan bagi pencari kerja khususnya bagi MBR/Keluarga Miskin	Pembuatan Jamban termasuk instalasi septictank
Pembiayaan Jaminan Kesehatan (Universal Health Coverage)	Program Padat Karya	IPAL Komunal
Pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi Bunda PAUD, RT, RW dan LPMK	Pemberian honor (Kader, Penjaga makam, Pendidik PAUD dan Kesetaraan, Guru agama)	Penyediaan Rusunawa
Pemberian PMT Paud, balita stunting, ibu hamil dan menyusui KEK, posyandu lansia, posyandu balita, disabilitas, yatim dan lansia		
Subsidi listrik lansia		
Bantuan kursi roda, penebusan ijazah, bantuan peralatan usaha		
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Bantuan Peralatan Modal Usaha	

Sumber: Bappeda Kota Surabaya

Tabel tersebut menggambarkan bentuk intervensi program dan kegiatan yang dirancang secara komprehensif oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan, dengan menitikberatkan pada tiga pendekatan utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Pendekatan ini mencerminkan strategi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga intervensi yang dilakukan bersifat holistik dan berkelanjutan. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Pada aspek pengurangan beban pengeluaran, pemerintah menghadirkan berbagai program perlindungan sosial yang ditujukan untuk meringankan biaya hidup masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program tersebut meliputi penyediaan pendidikan gratis beserta seragam untuk jenjang SD dan SMP, pemberian berbagai jenis beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, termasuk kelompok khusus seperti penghafal kitab suci dan bunda PAUD, serta jaminan kesehatan melalui skema *Universal Health Coverage*. Selain itu, terdapat pula pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan, bantuan pangan tambahan bagi kelompok rentan seperti balita stunting, ibu hamil, lansia, dan disabilitas, hingga subsidi listrik dan bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah penurunan kualitas hidup akibat tekanan ekonomi. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk penguatan UMKM melalui platform digital seperti e-Peken, pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, serta pengembangan program padat karya yang telah menjadi fokus utama dalam pembahasan sebelumnya. Di samping itu, pemberian honorarium kepada berbagai kelompok masyarakat yang berkontribusi dalam layanan sosial, seperti kader, pendidik PAUD, dan tenaga keagamaan, juga menjadi bagian dari strategi redistribusi pendapatan. Dukungan dalam bentuk bantuan peralatan usaha turut diberikan guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini tidak

hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi dan kewirausahaan masyarakat. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Adapun dalam konteks meminimalkan kantong-kantong kemiskinan, intervensi diarahkan pada perbaikan kondisi lingkungan dan permukiman masyarakat. Program seperti perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pembangunan fasilitas sanitasi termasuk *septic tank*, penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, serta pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hunian dan lingkungan hidup. Pendekatan ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan akses terhadap infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan tempat tinggal. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Secara keseluruhan, tabel tersebut menegaskan bahwa intervensi program padat karya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kerangka kebijakan yang lebih luas dan terintegrasi. Sinergi antara pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan perbaikan kondisi lingkungan menunjukkan adanya pendekatan multidimensional dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan pemberdayaan, sehingga diharapkan mampu menciptakan kemandirian masyarakat serta memperkuat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Tabel 2. 10 Rangkaian Intervensi Terpadu - Padat Karya untuk Pengentasan Kemiskinan Kota Surabaya

No.	Perangkat Daerah	Intervensi terkait padat karya
1.	DSBABM	Padat Karya Paving
2.	Disbudporapar	Pengembangan kawasan wisata rakyat
3.	DPRKPP	Padat Karya Rumah Tidak Layak Huni
4.	Disperinaker	Pelatihan dan Sertifikasi
5.	Dinkopdag	Akses permodalan Kurasi UMKM Akses pemasaran Optimalisasi toko kelontong Inovasi e-peken
6.	BPKAD	Pemanfaatan aset pemerintah kota untuk program padat karya
7.	Dinsos	Bantuan modal usaha Bantuan langsung tunai Bantuan untuk disabilitas
8.	DISHUB	Penyediaan moda transportasi terjangkau (Suroboyo Bus, Feeder Wira Wiri, Trans Semanggi)

Sumber: Bappeda Kota Surabaya

Tabel tersebut menjelaskan kerangka Rangkaian Intervensi Terpadu sebagai bentuk integrasi lintas perangkat daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya. Inti dari pendekatan ini terletak pada pemanfaatan data miskin sebagai basis utama perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga setiap intervensi yang dilakukan oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dapat lebih tepat sasaran, terkoordinasi, dan saling melengkapi. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan prinsip *evidence-based policy* dalam tata kelola pemerintahan, di mana data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kebijakan publik. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Dalam implementasinya, masing-masing OPD memiliki peran dan kontribusi spesifik sesuai dengan bidang tugasnya, namun tetap terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan yang sama. Dinas Pendidikan, misalnya, berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui program beasiswa, seragam gratis, hingga pemberian makanan tambahan bagi anak usia dini. Dinas Kesehatan turut mendukung melalui penyediaan layanan kesehatan berbasis *Universal Health Coverage* (UHC), penanganan stunting, serta intervensi gizi bagi kelompok rentan. Sementara itu, dinas teknis seperti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSBABM) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKPP) mengimplementasikan program padat karya dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti paving, IPAL komunal, serta perbaikan rumah tidak layak huni. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Di sektor ekonomi, intervensi dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag) melalui penguatan UMKM, akses permodalan, kurasi produk, hingga inovasi pemasaran digital seperti e-Peken. Hal ini diperkuat oleh peran Dinas Tenaga Kerja (Disperinaker) dalam memberikan pelatihan, sertifikasi, dan penyaluran tenaga kerja, sehingga menciptakan keterhubungan antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peluang kerja yang tersedia. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) juga berkontribusi melalui pengembangan sektor budidaya, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan, yang berpotensi menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Selanjutnya, dukungan sosial dan ekonomi juga diberikan melalui Dinas Sosial (Dinsos) dalam bentuk bantuan langsung tunai, bantuan modal usaha, serta bantuan bagi penyandang disabilitas. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) turut berperan dalam optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung program padat karya, serta pemberian subsidi pajak bagi kelompok tertentu seperti lansia. Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) menyediakan akses transportasi publik yang terjangkau guna meningkatkan mobilitas masyarakat dalam mengakses layanan dan peluang ekonomi. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Tabel 2. 11 Program Padat Karya: Lepas dari Belenggu Kemiskinan

Aspek	Uraian	Keterangan
Pemanfaatan aset nganggur Pemkot Surabaya	- Aset pemerintah biasanya terletak di lokasi strategis. Jangan hanya pengusaha besar yang bisa mengakses lokasi strategis kota. - Aset-aset idle Pemkot Surabaya kini digunakan untuk lahan usaha warga miskin: kafe, laundry, cuci motor, dsb.	Lokasi strategis
Produksi warga miskin didorong pemerintah	Warga miskin dilatih berproduksi, mulai paving hingga namin. Produksinya diborong Pemkot Surabaya, paralel menggarap pasar umum. Juga ada platform belanja ASN/Perangkat Daerah bernama "e-Peken".	Dukungan produksi dan pasar
Hasil jitu	Menjangkau 35.638 KK Miskin	Cakupan penerima manfaat
	84 aset Pemkot disulap menjadi rumah padat karya	Pemanfaatan aset untuk kegiatan padat karya
	Rata-rata pendapatan yang diberdayakan Rp 5-7 juta perbulan	Peningkatan pendapatan

Sumber: Bappeda Kota Surabaya

Tabel tersebut menegaskan esensi utama dari program padat karya sebagai instrumen strategis dalam melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan berbasis aset dan produksi. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai upaya penciptaan lapangan kerja sementara, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sosial-ekonomi yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Salah satu inovasi utama yang ditampilkan dalam slide ini adalah pemanfaatan aset “menganggur” milik Pemerintah Kota Surabaya yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Aset-aset tersebut, yang umumnya berada di lokasi strategis, kini dialihkan fungsinya menjadi ruang produktif bagi masyarakat miskin untuk menjalankan kegiatan ekonomi, seperti usaha kuliner, laundry, hingga jasa cuci kendaraan. Pendekatan ini sekaligus mengoreksi ketimpangan akses terhadap ruang ekonomi yang selama ini cenderung didominasi oleh pelaku usaha bermodal besar. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Di sisi lain, pemerintah juga berperan aktif dalam mendorong proses produksi masyarakat melalui berbagai bentuk intervensi, seperti pelatihan keterampilan dan fasilitasi usaha. Warga miskin tidak hanya didorong untuk bekerja, tetapi juga dibekali kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai ekonomi, mulai dari pekerjaan konstruksi sederhana seperti paving hingga produksi makanan dan minuman. Hasil produksi tersebut tidak hanya dipasarkan di pasar umum, tetapi juga diserap oleh pemerintah melalui berbagai mekanisme, termasuk platform digital e-Peken yang menghubungkan pelaku UMKM dengan kebutuhan belanja Aparatur Sipil

Negara (ASN) dan perangkat daerah. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai *regulator*, tetapi juga sebagai *market creator* yang menciptakan permintaan bagi produk masyarakat. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Tercatat sebanyak 35.638 kepala keluarga miskin telah berhasil ditingkatkan kondisi ekonominya melalui program ini. Selain itu, sebanyak 84 aset milik pemerintah telah direvitalisasi menjadi rumah padat karya yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi dari program ini juga terlihat dari peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat yang diberdayakan, yaitu mencapai kisaran Rp5–7 juta per bulan. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Tabel 2. 12 Jenis-jenis Pelatihan/Bimtek Padat Karya

No.	Jenis Pelatihan/Bimtek Padat Karya	Jumlah peserta	Keterangan
1.	Bimtek Cuci & Bengkel kendaraan	414 orang ditempatkan di RPK	Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran melalui Program Padat Karya dengan berbagai pelatihan/ bimtek keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
2.	Bimtek Laundry		
3.	Bimtek Jahit seragam		
4.	Bimtek Jahit sepatu/Slipper		
5.	Bimtek usaha sablon		
6.	Bimtek usaha batik		
7.	Bimtek usaha olahan kuliner		
8.	Bimtek pembuatan sabun		
9.	Bimtek barista kopi		
10.	Bimtek tata rias		
11.	Bimtek desain grafis		
12.	Bimtek digital marketing		
13.	Bimtek budidaya lele		
14.	Bimtek hidroponik		
15.	Bimtek reparasi HP		
16.	Bimtek las listrik		
17.	Bimtek Instalasi listrik		
18.	Bimtek Plambing		
19.	Bimtek pengolahan sampah		
20.	Bimtek pembuatan kerajinan tangan		
21.	Bimtek fotografi		
22.	Bimtek cooking class		
23.	Bimtek manajemen usaha kecil		

Sumber: Bappeda Kota Surabaya

Tabel tersebut menggambarkan dimensi penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi program padat karya melalui penyelenggaraan berbagai jenis pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek). Pemerintah Kota Surabaya secara aktif mengembangkan strategi peningkatan keterampilan masyarakat sebagai bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Dalam konteks ini, pelatihan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pendukung, melainkan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar serta memiliki daya saing yang lebih tinggi. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)


Beragam jenis pelatihan yang disediakan menunjukkan pendekatan yang berbasis kebutuhan (*demand-driven*) dan potensi ekonomi lokal. Pelatihan tersebut mencakup sektor jasa seperti cuci kendaraan dan laundry, sektor industri kreatif seperti sablon, batik, dan pembuatan produk olahan, hingga keterampilan teknis seperti menjahit seragam dan pembuatan sepatu atau slipper. Selain itu, pelatihan di bidang kuliner dan produksi barang konsumsi juga menjadi fokus, mengingat sektor ini memiliki peluang pasar yang luas dan relatif mudah diakses oleh masyarakat. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Selanjutnya, pelaksanaan pelatihan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan tahapan lanjutan dalam program padat karya, seperti penempatan kerja dan pengembangan usaha. Hal ini tercermin dari adanya data bahwa sebanyak 414 orang telah ditempatkan di Rumah Padat Karya (RPK) sebagai tindak lanjut dari proses

pelatihan. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan secara teoritis, tetapi juga diikuti dengan praktik langsung serta akses terhadap peluang kerja atau usaha. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara proses peningkatan kapasitas dan pemanfaatan keterampilan dalam aktivitas ekonomi nyata. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Selain itu, pendekatan pelatihan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan berbasis kompetensi. Dengan memiliki keterampilan yang relevan, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga mampu menciptakan sumber penghasilan secara mandiri maupun berkelompok. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang menekankan pada *capacity building* dan pemberdayaan (*empowerment*), di mana masyarakat didorong untuk menjadi aktor utama dalam proses peningkatan kesejahteraannya. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Tabel 2. 13 Beberapa Contoh Nyata Program Padat Karya yang Telah Berjalan

No.	Jenis Program Padat Karya	Rata-rata Pendapatan	Gambar di lapangan	Keterangan
1.	Padat Karya Produksi Paving & U-Ditch	Rp 3-4jt / Bulan		Padat Karya Produksi Paving. Hasilnya dibeli untuk penataan kampung se-Surabaya
2.	Padat Karya Kedai Kopi	-		Tenaga kerja berasal dari Warga Pra Sejahtera / Miskin dan Karang Taruna & Kepemudaan
3.	Padat Karya Jahit Seragam	Rp 2.058.935 / bulan		433 Orang telah dimitirakan ke 37 Pelaku Usaha Mikro / Koperasi Jahit
4.	Padat Karya Jahit Sepatu	Rp 1.500.000 / bulan		9 Orang telah dimitirakan ke 9 Pelaku Usaha Mikro Pengrajin Jahit Sepatu
5.	Padat Karya Jahit Tas	Rp 1.500.000 / Bulan		Memperkerjakan 12 Orang ke 8 Kelompok Usaha

6.	Padat Karya Toko Kelontong	Rp 2.000.000 / Bulan	 <p>TOKO KELONTONG Total 150 Orang (s/d Apr 2024)</p> <p>Gelombang 1 : 9 Orang Gelombang 2 : 19 Orang Gelombang 3 : 70 Orang Gelombang 4 : 4 Orang Gelombang 5 : 11 Orang Kec. Karang Pilang & Gayungan : 29 Orang Petukir dan Pokmas : 8 Orang</p> <p>Potensi Pendapatan Rp 2.000.000 / Bulan</p>	Gelombang 1 : 9 Orang Gelombang 2 : 19 Orang Gelombang 3 : 70 Orang Gelombang 4 : 4 Orang Gelombang 5 : 11 Orang Kec. Karang Pilang & Gayungan : 29 Orang Petukir dan Pokmas : 8 Orang												
7.	Padat Karya Sentra Wisata Kuliner (SWK)	Rp 2.000.000 s.d 3.000.000 / Bulan	 <p>SENTRA WISATA KULINER (SWK)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah SWK : 50 SWK Jumlah Stan SWK : 1.404 Stan Jumlah Stan Terisi : 1.143 (Gamis : 179, Non Gamis : 964) Jumlah Stan Kosong SWK : 261 Stan <p>Rata-rata Pendapatan Rp 2.000.000 s.d 3.000.000 Per-Bulan</p> <p>*1 Omzet Berasasi bergantung lokasi SWK</p>	Jumlah SWK : 50 SWK Jumlah Stan SWK : 1.404 Stan Jumlah Stan Terisi : 1.143 (Gamis : 179, Non Gamis : 964) Jumlah Stan Kosong SWK : 261 Stan												
8.	Padat Karya Slipper	Rp 1.300.000 / Bulan	 <p>SLIPPER</p> <p>Memperkerjakan 8 Orang ke 2 Kelompok Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> KUB MAMPU JAYA (Eksisting 2 Orang) UMKM J25 Surabaya (Eksisting 6 Orang) <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NAMA USHA</th> <th>JUMLAH PEKERJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KUB MAMPU JAYA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UMKM J25</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pendapatan Rata-rata Rp 1.300.000 / Bulan</p> <p>Dengan asumsi pekerja maksimal 10 orang, karena tidak semua hotel ber-MCU menggunakan slipper</p>	NO.	NAMA USHA	JUMLAH PEKERJA	1	KUB MAMPU JAYA	2	2	UMKM J25	6	JUMLAH		8	Memperkerjakan 8 Orang ke 2 Kelompok Usaha: 1.KUB MAMPU JAYA (Eksisting 2 Orang) 2.UMKM J25 Surabaya (Eksisting 6 Orang)
NO.	NAMA USHA	JUMLAH PEKERJA														
1	KUB MAMPU JAYA	2														
2	UMKM J25	6														
JUMLAH		8														

Sumber: Bappeda Kota Surabaya

Berdasarkan data pada tabel tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan berbagai program padat karya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan pra-sejahtera. Program tersebut tidak hanya

berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan keterampilan dan pendapatan masyarakat melalui berbagai sektor usaha produktif, seperti produksi paving dan U-Ditch, kedai kopi, usaha jahit seragam, jahit sepatu, jahit tas, toko kelontong, Sentra Wisata Kuliner (SWK), serta produksi slipper. Setiap program dirancang untuk menyerap tenaga kerja lokal dan memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Dari sisi ekonomi, program padat karya memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Program produksi paving dan U-Ditch mampu menghasilkan pendapatan rata-rata sebesar Rp3–4 juta per bulan, sedangkan program Sentra Wisata Kuliner (SWK) memberikan pendapatan berkisar Rp2–3 juta per bulan. Sementara itu, program jahit seragam menghasilkan rata-rata pendapatan sebesar Rp2.058.935 per bulan, program toko kelontong sekitar Rp2 juta per bulan, serta program jahit sepatu, jahit tas, dan slipper berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Besaran pendapatan tersebut menunjukkan bahwa program padat karya mampu menjadi alternatif sumber penghasilan bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Selain meningkatkan pendapatan, program padat karya juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan usaha mikro. Program jahit seragam, misalnya, telah memfasilitasi kemitraan bagi 433 orang dengan 37 pelaku usaha mikro dan koperasi jahit. Program jahit sepatu melibatkan 20 orang yang dimitrakan kepada

9 pelaku usaha mikro pengrajin sepatu, sedangkan program jahit tas berhasil mempekerjakan 12 orang pada 8 kelompok usaha. Pada program slipper, terdapat 8 orang yang diberdayakan melalui dua kelompok usaha, yaitu KUB Mampu Jaya dan UMKM J25 Surabaya. Data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha mikro menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Tabel 2. 14 Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Surabaya

No.	Program/Inisiatif	Keterangan
1.	Kolaborasi BPR SAU	Kerjasama dengan BPR SAU dalam mendukung akses keuangan masyarakat
2.	KKMP (untuk produk makanan olahan atau produk barang lainnya)	Program kredit kelompok masyarakat produktif untuk mendukung pelaku usaha
3.	PUSPITA	Program peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku usaha
4.	Rumah Padat Karya	Pemanfaatan aset/rumah untuk kegiatan padat karya dan pemberdayaan masyarakat
5.	E-Katalog/LKPP	Pemanfaatan e-katalog lokal untuk meningkatkan transaksi produk lokal
6.	E-Peken Surabaya	Platform digital untuk pemasaran produk UMKM Kota Surabaya
7.	Omzet Peken	208,6 Milyar Rupiah (Transaksi Oktober 2021 s.d Desember 2025)

Sumber: Bappeda Kota Surabaya

Tabel tersebut menggambarkan peran strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai salah satu instrumen pendukung dalam memperkuat implementasi program padat karya melalui peningkatan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Dalam konteks ini, TPAKD berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi

kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Berbagai bentuk kolaborasi yang ditampilkan, seperti kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) SAU, program Kredit Kreatif Mikro Program (KKMP), serta inisiatif PUSPITA (Pinjaman Usaha Syariah Tanpa Agunan), menunjukkan adanya upaya konkret dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Selain itu, integrasi program TPAKD dengan skema padat karya, seperti Rumah Padat Karya, e-Katalog LKPP, dan platform digital e-Peken Surabaya, menunjukkan adanya pendekatan yang komprehensif dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis masyarakat. Melalui e-Peken, misalnya, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses pasar, tetapi juga terhubung dengan sistem transaksi digital yang meningkatkan transparansi dan efisiensi. Hal ini tercermin dari capaian omzet e-Peken yang mencapai Rp208,6 miliar dalam periode Oktober 2021 hingga Desember 2025, yang menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari integrasi program tersebut. Dengan demikian, akses keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai katalisator dalam memperluas peluang usaha dan meningkatkan skala ekonomi pelaku UMKM. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)

Selanjutnya, tabel tersebut juga menampilkan pengakuan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan melalui berbagai penghargaan yang diraih oleh Kota Surabaya, seperti TPAKD Award tahun 2025 dan *Financial Literacy Award* tahun 2024.

Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan inklusi keuangan yang efektif dan inovatif. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, capaian ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha mampu menciptakan sistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (Bappeda Kota Surabaya, 2025)